KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN

GINSI

JATENG

Edisi Mei 2025 : 984 TAHUN KE - LIII

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WA : 082133919046
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com

Gubernur Jateng Desak Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Rampung Dalam Setahun

BULETIN GINSI JATENG

MEI 2025

NOMOR : 984 TAHUN KE - LIII

DAFTAR ISI

- Liputan Khusus : Gubernur Jateng Desak Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Rampung Dalam Setahun 1
- Sektor Pertanian Jadi Penopang Ekonomi Jateng 2
- Tarif Impor AS-China Turun, Indonesia Ambil Peluang Lobi Trump 5
- Perusahaan Impor Nakal Waspada, Izin Usaha Bisa Dicabut Tanpa Ampun 6
- Djaka Budi Utama Pimpin Bea Cukai, GINSI Siap Berkolaborasi 7
- Indonesia Nomor 122 dari 122 Negara soal Hambatan Ekspor dan Impor 10
- RI Ekspor Minyak Mentah ke 9 Negara Ini, Nilainya Rp36,9 T 11
- BPJPH RI Bahas Penguatan Kerja Sama Ekspor-Impor Produk Halal dengan USDA dan USMEF 12
- BPOM dan Barantin Satukan Langkah Dalam Pengawasan Ikan dan Daging Impor 13
- Kadin Jateng Sambut Positif Wacana Deregulasi Kebijakan Ekspor-Impor 14
- Cilacap Siap Jadi Hub Impor Ternak Nasional, Fasilitas Karantina Diperluas Hingga Tampung 20 Ribu Sapi 15
- Pelabuhan Ekspor-Impor Utama Dipindahkan ke Indonesia Timur, Ketua INSA: Potensi Luar Biasa 16
- Peraturan Pemerintah : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene 17
- Kegiatan BPD Ginsi Jateng Periode Mei 2025 20

**** dihimpun dari berbagai sumber*

LIPUTAN KHUSUS :

GUBERNUR JATENG DESAK REVITALISASI PELABUHAN TANJUNG EMAS RAMPUNG DALAM SETAHUN

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang agar tuntas dalam kurun waktu satu tahun. Langkah ini dianggap penting demi menyiapkan Jawa Tengah sebagai poros ekspor-impor nasional.

"Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya," kata Luthfi saat mendampingi Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja ke pelabuhan tersebut, Jumat (23/5/2025).

Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas dinilai sebagai salah satu pilar untuk mendongkrak daya saing Jawa Tengah terhadap provinsi lain yang sudah lebih dulu memiliki pelabuhan besar dan modern.

Dengan adanya geliat investasi dan kawasan industri yang tumbuh pesat, menurut Luthfi, akses logistik harus segera ditingkatkan.

"Dalam satu tahun ke depan, produksi di Jawa Tengah akan melimpah, maka sarana pelabuhan harus representatif, dengan begitu berjalannya barang dan orang akan lebih lancar," ujarnya.

Menurutnya, upaya percepatan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi dan pengawalan dari pemerintah pusat dan legislatif.

"Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kita mohon kepada beliau untuk mengawal, sehingga kerja-kerja teamwork akan bersama-sama dilakukan," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pihaknya siap mengawal percepatan tersebut. Menurutnya, jejaring logistik di Jateng harus dibenahi secara menyeluruh, mulai dari pelabuhan, jalan, hingga sistem distribusi.

"Transformasi perlu dipercepat semuanya. Pengembangan dermaga dan perpanjangannya, kemudian akses infrastruktur jalan, kita ingin diperbaiki secepatnya, supaya lalu lintas logistik kita bisa berjalan normal dan maksimal," tegas Huda.

Komisi V, lanjut dia, akan mendalami rencana Pemprov Jateng, sekaligus membangun komunikasi lintas kementerian dan sektor swasta.

"Teman-teman di Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum (PU) sedang membahas untuk memenuhi target tentang perbaikan yang ada di pelabuhan Tanjung Emas ini, termasuk ada kemungkinan investor masuk di sini," ujarnya.

Direktur Investasi PT Pelindo Persero, Boy Robyanto, mengungkapkan proyek pengembangan pelabuhan sudah mencapai 50 persen. Meski demikian, kendala teknis seperti penurunan muka tanah menjadi tantangan serius.

"Dengan kondisi teknis yang ada, pengembangan tetap kita lakukan. Sekarang sedang mengerjakan peninggian dermaga," katanya.

Boy juga menjelaskan, Pelabuhan Tanjung Emas memiliki struktur dermaga bertingkat pertama di Indonesia. Peninggian dermaga terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak penurunan tanah yang mencapai 13–17 cm per tahun.

SEKTOR PERTANIAN JADI PENOPANG EKONOMI JATENG

SEMARANG- Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tetap kuat ditengah peningkatan ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tgl 5 Mei 2025 mencatatkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,96% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh sebesar 4,96% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 4,87% (yoy).

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Andi Reina Sari mengatakan, dari sisi pengeluaran, konsumsi RT masih menjadi kontribusi utama pertumbuhan Jawa Tengah meski tumbuh melambat. Pada periode laporan, konsumsi RT memiliki share sebesar 60,40% dari PDRB Jawa Tengah dan tumbuh 4,98% (yoy) atau mengalami perlambatan dibanding periode sebelumnya (5,26%, yoy).

"Hal tersebut sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Tengah yang mengalami perlambatan," katanya.

Dijelaskan, IKK Jawa Tengah pada triwulan I 2025 sebesar 125,46, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 136,09. Namun demikian, capaian IKK tersebut masih berada pada level optimis (>100).

Pada konsumsi pemerintah mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi. Konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,04% (yoy) setelah di periode sebelumnya terkontraksi sebesar 1,96% (yoy).

"Membaiknya kontraksi sejalan dengan APBN dan APBD kabupaten/kota yang terjadi kenaikan 50% pada Belanja Pegawai. Namun penurunan yang terjadi pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal menahan perbaikan konsumsi pemerintah lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, impor masih tinggi di tengah perlambatan ekspor. Impor tumbuh sebesar 10,04% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (8,25%; yoy). Informasi BPS menunjukkan kenaikan aktivitas impor di Jawa Tengah terutama impor bahan baku dan penolong

industri pengolahan yang meningkat dari US$2,04 miliar di triwulan IV 2024 menjadi US$3,03 miliar di triwulan I 2025.

Lebih lanjut, impor barang modal juga mengalami peningkatan dari US$266,57 juta di triwulan IV 2024 menjadi US$322,06 juta. Ke depan, peningkatan impor bahan baku dan barang modal tersebut diharapkan meningkatkan kinerja perekonomian, terutama melalui peningkatan ekspor maupun konsumsi RT.

Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berasal dari sektor Pertanian. Pada periode laporan, sektor Pertanian tumbuh tinggi, yaitu sebesar 15,24% (yoy) dipengaruhi oleh panen raya beras yang kembali kepada pola musiman pada Maret-April 2025.

Pola panen yang kembali ke pola normal setelah setelah terjadi pergeseran di tahun 2024. Di tahun 2024, terjadi pergeseran pola panen akibat anomali cuaca serta bencana banjir di beberapa daerah sentra padi dan hortikultura di Jawa Tengah.

Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, luas tanam Jawa Tengah hingga April 2025 mencapai 716 ribu Ha dengan kuantitas panen hingga 4,09 juta ton GKG. Dengan demikian, produksi padi di triwulan I 2025 meningkat 52,70% (yoy) atau 159,29% (qtq).

Ke depan, ekonomi Jawa Tengah diprakirakan tetap kuat dengan didukung permintaan domestik ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Pertumbuhan akan bersumber dari konsumsi pemerintah seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 11 Tahun 2025. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi ASN pada bulan Juni 2025.

Pemilihan waktu pencairan ini bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah, sehingga diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan anggota keluarga para pensiunan. Lebih lanjut, terdapat potensi peningkatan demand masyarakat seiring dengan momentum Idul Adha (Juni 2025) dan liburan sekolah sehingga diperkirakan terjadi kenaikan konsumsi rumah tangga

Untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Tengah, diperlukan sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Bank Indonesia, serta peran aktif dari para pelaku usaha dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi tetap kondusif," tandasnya

Zulkifli Hasan Tahan Permintaan Impor Jagung

Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memutuskan untuk menahan sementara permintaan impor jagung untuk kebutuhan industri. Pasalnya, Indonesia sedang menjalani masa panen raya jagung.

Zulkifli mengatakan, permintaan impor jagung untuk industri itu terbilang sedikit, hanya sekitar 3.000 ton. Meski belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, dia tetap menahan sementara permintaan tersebut.

"Tadi ada usulan dari Kementerian Perindustrian ya, jagung, jagung Industri. Tapi kita belum setujui karena sekarang lagi panen raya. Enggak banyak ya, mungkin 3 ribuan ton, sedikit. Karena ini yang belum bisa kita produksi," ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Dia menjelaskan, upaya menahan impor jagung industri itu sebagai cara untuk menjaga harga di tingkat petani saat panen raya. Menurutnya, masih banyak daerah yang menjual jagung dengan harga di bawah Rp 5.500 per kilogram.

"Tapi kita lagi panen raya, di beberapa tempat jagung belum harganya Rp5.500, pemerintah kita sedang all out habis-habisan agar jagung bisa harga Rp 5.500," tuturnya.

Kendala lainnya, kata Zulkifli, adalah ketersediaan gudang untuk menampung jagung hasil panen raya tadi. Pasalnya, sebagian gudang

penyimpanan dipakai untuk menampung beras yang juga tengah melimpah.

"Habis gudang-gudang. Jadi jagung lagi panen raya juga kan. Nah ini problemnya ada di gudang. Oleh karena itu kita impor jagung walaupun sedikit untuk industri yang kita belum bisa bikin kita tidak bolehkan dulu sekarang lagi panen raya," tutur Zulkifli Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan, panen raya untuk jagung akan datang pada Februari 2025 mendatang. Oleh karena itu, pemerintah bakal turut mengatur kuota impor gandum untuk pakan ternak, agar hasil produksi jagung di musim panen bisa terserap maksimal.

Menko Zulhas berharap, produksi jagung untuk pakan ternak bisa banyak. Pada masa ini, pemerintah berkomitmen untuk turut melindungi para petani jagung agar harga jual hasil produksinya tidak anjlok.

"Oleh karena itu, nanti kalau ada impor gandum untuk ternak harus dirakorkan beberapa ketentuan, yang tidak mengganggu (produksi jagung lokal)," ujar Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Zulhas mengatakan, pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) nantinya juga akan turut mengkaji soal aturan terkait penerapan kuota impor gandum untuk pakan ternak.

"Karena sekarang semangat petani jagung luar biasa, kita tidak ingin semangat itu luntur gara-gara impor bahan-bahan yang akan mengganggu produksi jagung," imbuh dia.

Dia tak ingin petani jagung justru kesulitan dalam masa panen, akibat maraknya impor gandum untuk pakan ternak dengan harga lebih miring.

"Tapi jangan salah kutip, gandum yang untuk pakan ternak, bukan gandum secara umum. Itu kalau impor harus diputuskan secara rakortas. Karena kalau itu banjir, nanti jatuhnya kan akan enggak terserap oleh pabrik-pabrik, karena sudah diganti oleh gandum untuk ternak," tuturnya.

"Harga anjlok lagi, petani akan sulit untuk membeli. Itu (opsi impor untuk gandum pakan ternak) perlu dirakortaskan," tegas Menko Pangan.

TARIF IMPOR AS-CHINA TURUN, INDONESIA AMBIL PELUANG LOBI TRUMP

Indonesia akan memanfatkan momen penurunan tarif impor Amerika Serikat (AS) dan China sebagai jalan bernegosiasi membahas tarif impor dengan negara tersebut. Adapun tarif impor kedua negara turun selama 90 hari.

"Kan 90 hari ke depan (AS) dengan China *pause*. jadi kita memanfaatkan waktu itu untuk bernegosiasi dengan Amerika," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan melansir Antara di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Airlangga mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempelajari materi pembicaraan dan mempersiapkan komoditas strategis yang diperlukan dalam negosiasi tersebut. Dari sisi makro ekonomi, Airlangga menilai jeda sementara 90 hari ini belum bisa dianggap sebagai meredanya ketegangan dagang. Meski pasar bereaksi positif terhadap pengumuman ini, Pemerintah tidak bisa langsung mengambil kesimpulan karena sifatnya yang masih temporer. "Market bereaksi positif tapi kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena ini baru periode sementara," ucap dia.

AS dan China sepakat melakukan pelonggaran tarif secara signifikan selama 90 hari, menandai momen langka dalam konflik dagang berkepanjangan kedua negara dan memberikan harapan baru bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam suatu pernyataan bersama yang disiarkan oleh pemerintah AS pada Senin (12/5). Kesepakatan itu tercapai setelah negosiasi intensif akhir pekan di Jenewa, Kedua negara akan memangkas bea masuk atas produk masing-masing secara drastis. AS akan menurunkan tarif atas barang-barang asal China dari 145 persen menjadi 30 persen, sementara China akan menurunkan tarif atas produk AS dari 125 persen menjadi 10 persen paling lambat 14 Mei.

Meskipun bersifat sementara, kesepakatan itu menjadi langkah paling signifikan dalam upaya meredakan ketegangan dagang selama beberapa tahun terakhir, sekaligus memberi angin segar bagi pasar global yang selama ini dihantui ketidakpastian.

Dalam pernyataan itu, kedua negara menekankan pentingnya membangun hubungan dagang yang "berkelanjutan, jangka panjang, dan saling menguntungkan.

Fithra menyoroti kebijakan kuota impor di Indonesia yang menurutnya tidak berorientasi pada surplus konsumen.

“Dari sisi import kuota, kalau kita yang pernah belajar international economics atau international trade, kita pasti sudah tahu bahwa import kuota menjadi salah satu trade policy yang paling buruk. Karena tidak hanya mengambil consumer surplus, tetapi dia juga ada biaya yang bukan diambil pemerintah tetapi oleh import license holder,” jelas Fithra dalam webinar diskusi bersama Center for Indonesian Policy Studies, Rabu (14/5/2025).

Ia menilai, import license holder pada prakteknya berisiko menimbulkan peluang korupsi.

“Kita kan tidak tahu mereka dapat license itu bagaimana caranya? Maka kemungkinan-kemungkinan rent seeking behavior di situ. Maka dari itu, kalau pun mau diperbaiki kebijakan tarifnya maka perlu diberi safeguard atau sebagainya,” jelas dia.

PERUSAHAAN IMPOR NAKAL WASPADA, IZIN USAHA BISA DICABUT TANPA AMPUN

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan impor ilegal berbagai jenis produk apapun.

Hal itu disampaikan Mendag saat melakukan ekspose produk-produk impor yang tidak sesuai ketentuan seperti perkakas tangan, peralatan listrik, serta produk turunan besi dan baja, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).

"Sanksi yang dapat diberikan, yang pertama tentu kami melakukan pendekatan, persuasi setelah itu kalau tidak terbuka tidak memenuhi maka perusahaan tidak boleh mengedarkan barang-barang (impor)," kata Mendag Budi.

Bahkan, jika perusahaan yang melakukan impor tetap menyalahi aturan, Kementerian Perdagangan tidak segan untuk menutup izin usahanya.

"Berikutnya perusahaan bisa ditutup izinnya dan tidak boleh melakukan kegiatan serupa," ujarnya.

Ia menambahkan, perusahaan juga diwajibkan menarik produk yang telah beredar jika terbukti tidak memenuhi standar yang berlaku.

ia menuturkan, kegiatan tersebut melanggar undang-undang perlindungan konsumen, undang peraturan atau peraturan pemerintah atau PP nomor 29 tentang penyelenggaraan perdagangan, ketentuan mengenai pengawasan barang, ketentuan mengenai kebijakan impor, dan ketentuan lain yang mengakibatkan atau merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa merugikan atau mengakibatkan industri dalam negeri ini banyak yang tutup karena impor ilegal seperti ini.

"Juga untuk melindungi para konsumen dari barang-barang yang tidak sesuai standar," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menggelar ekspose produk-produk impor yang tidak sesuai ketentuan seperti perkakas tangan, peralatan listrik, serta produk turunan besi dan baja, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Pagi ini kita bersama-sama melakukan ekspos terhadap hasil pengawasan dan pengamanan terhadap produk-produk seperti perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesoris pakaian, besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diimpor dari Cina oleh PT Asiaalum Trading Indonesia atau PT ATI yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Mendag Budi, di Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).

Mendag menegaskan, kegiatan pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan juga untuk melindungi konsumen.

Barang-barang tersebut telah diamankan dengan rincian barang sebagai berikut, MCB (Miniature Circuit Breaker) sebanyak 68.256 pcs, gerindera listrik, bor listrik, gergaji listrik dan mesin serup listrik sebanyak 9.763 pcs, penghisap debu sebanyak 26 unit, sarung tangan sebanyak kurang lebih 600.000 pcs, gunting dua tangan sebanyak 77 pcs, kapak sebanyak 66 pcs, penggaris besi atau UTTP sebanyak 578 pcs,baut dan mur berbagai ukuran sebanyak 997.269 pcs, sekel sebanyak 4.215 pcs.

"Total yang diamankan sebanyak 1.680.047 pcs atau diperkirakan senilai Rp18,85 miliar," ujar Mendag.

Adapun sebagai tindak lanjut atas barang-barang ini maka Kementerian Perdagangan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pelaku usaha atau importir ini melengkapi dokumen dan data yang diperlukan.

"Jadi, barang ini sementara masih dalam pengawasan kami sampai kelengkapan dokumen dapat terpenuhi," ujarnya.

DJAKA BUDI UTAMA PIMPIN BEA CUKAI, GINSI SIAP BERKOLABORASI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Jumat (23/5/2025) resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Djaka dipercaya menggantikan Askolani yang kini menempati jabatan sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenkeu.Djaka sebelumnya merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Angkatan Darat (AD), namun kini telah berstatus purnawirawan. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) yang juga Pengurus KADIN Indonesia, Erwin Taufan mengatakan, pelaku usaha siap berkolaborasi mendukung program kerja Ditjen Bea dan Cukai untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Sebagai pelaku importasi, GINSI sangat mendukung komitmen Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan pembenahan terkait pengawasan barang melalui pelabuhan maupun bandara yang masuk secara ilegal untuk mendongkrak penerimaan negara," ujar Taufan melalui keterangannya pada Sabtu (24/5/2025).

Dia mengatakan, masuknya barang ilegal dapat mengganggu stabilitas industri nasional dan pasar domestik sehingga upaya mencegah hal itu perlu kolaborasi berbagai pihak termasuk asosiasi pelaku usahanya seperti GINSI.

Taufan mengungkapkan, upaya pengawasan masuknya barang ilegal di beberapa pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, saat ini telah menggunakan siatem informasi dan teknologi (IT) yang mumpuni melalui fasilitas X-Ray atau alat deteksi isi petikemas berteknologi terkini.

"Inovasi pengawasan dengan penggunaan IT seperti itu yang perlu terus dikembangkan. Dan kami sebagai pelaku usaha sangat mendukung," ucap Taufan.

Dia menambahkan, dengan latar belakang dan pengalamanya, sosok Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama tidak perlu diragukan untuk dapat berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian (lintas sektoral) guna mengawasi pelanggaran masuknya barang ilegal ke dalam negeri.

Taufan menambahkan, GINSI sebagai wadah untuk para pelaku usaha importir dalam mengembangkan jaringan bisnis, berbagi informasi, serta bekerja sama dalam berbagai bidang perdagangan dan distribusi barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Asosiasi ini juga berperan strategis sebagai wakil kepentingan perusahaan importir dalam berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah terkait importasi.

"Juga mengedukasi dan memfasilitasi kerja sama antara anggotanya dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan para stakeholders terkait," papar Taufan.

Sementara itu, usai dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama menegaskan bahwa instansinya memastikan untuk mengawasi aktivitas pelabuhan-pelabuhan ilegal yang kerap jadi tempat keluar-masuknya barang impor/ekspor ilegal dan merugikan penerimaan negara. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah

Priok Darurat Kontainer Longstay, Ini Respon Importir

Jumlah kontainer longstay di sejumlah fasilitas terminal petikemas di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Senin (19/5/2025) pukul 14.00 Wib mencapai 9.471 bok. Jumlah itu bertambah sekitar 400-an bok dalam sehari tetakhir ketimbang data yang tercatat pada Minggu 18 Mei 2025 sebanyak 9.097 bok.

Karenanya, instansi terkait dan seluruh stakeholders agar melakukan action konkret untuk segera mengeluarkan kontainer-kontainer itu dari lini 1 pelabuhan Tanjung Prioj. Sebab keberadaan kontainer-kontainer 'tak bertuan' itu sangat mengganggu kondisi yard occupancy ratio (YOR) di lapangan lini 1 terminal di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Apalagi, ada juga sejumlah kontainer yang sudah mengendap belasan tahun di pelabuhan. Selain itu, keberadaan kontainer longstay itu telah mereduksi tingkat YOR dimasing-masing terminal peti kemas rerata 5-10% dari kapasitas eksisting.

Berdasarkan data yang dihimpun Logistiknews.id, pada Senin (19/5/2025) siang, bahwa hingga 19 Mei 2025 pukul 14.00 Wib masih ada sebanyak 9.471 bok kontainer longstay di Pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah itu justru bertambah hampir 400-an kontainer ketimbang kemarin atau data per 18 Mei 2025 yang tercatat 9.097 bok.

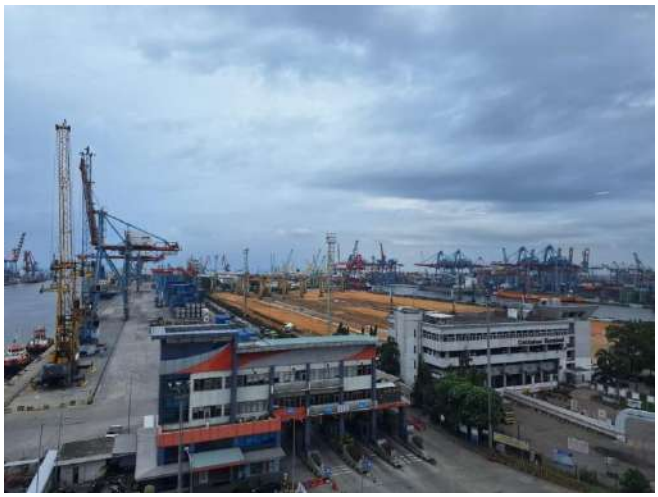

Adapun kontainer longstay per 19 Mei 2025 itu tersebar di Jakarta International Container Terminal (JICT) 3.945 bok, Terminal Petikemas (TPK) Koja 114 bok, IPC TPK Internasional (OJA) 239 bok, <span;>IPC TPK Internasional (TSJ) 253 bok, IPC TPK Domestik (MSA) 90 bok, IPC TPK Domestik (Temas) 19 bok, IPC TPK Domestik (009) 434 bok, IPC TPK Domestik (Adipurusa) 1.015 bok, IPC TPK Domestik (DHU) 516 bok.

Adapun, jumlah kontainer longstay di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) sebanyak 1.825 bok, dan Terminal Mustika Alam Lestari/MAL sebanyak 757 bok.

Padahal data per Minggu 18 Mei 2025, dihimpun Logistiknews.id, atau sehari sebelumnya menyebutkan bahwa hingga 18 Mei 2025 pukul 14.00 Wib masih ada sebanyak 9.097 bok kontainer longstay di Pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah itu justru bertambah sekitar 15% ketimbang data per 16 Mei 2025 yang hanya 7.893 bok.

Data kontainer longstay per 18 Mei 2025 itu tersebar di Jakarta International Container Terminal (JICT) 4.075 bok, Terminal Petikemas (TPK) Koja 114 bok, IPC TPK Internasional (OJA) 245 bok, IPC TPK Internasional (TSJ) 286 bok, IPC TPK Domestik (MSA) 63 bok, IPC TPK Domestik (Temas) 7 bok, IPC TPK Domestik (009) 495 bok, IPC TPK Domestik (Adipurusa) 969 bok, IPC TPK Domestik (DHU) 431 bok.

Selain itu, kontainer longstay di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) sebanyak 1.510

bok, dan Terminal Mustika Alam Lestari/MAL 902 bok.

Pemilik barang impor-pun angkat bicara mengenai persoalan itu.

Bahkan, Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan, tidak segan-segan mendesak agar Instansi berwenang di Pelabuhan Priok segera berkolaborasi dengan stakeholders terkait untuk mengambil langkah cepat dan tepat guna mengeluarkan kontainer-kontainer longstay tersebut.

"Kalau selama ini pemilik barang ada yang menjadikan pelabuhan sebagai tempat penyimpanan kontainer, lantaran pemilik barang tidak memiliki fasilitas inventory atau gudang sendiri di luar pelabuhan," ucap Taufan kepada Logistiknews.id, pada Senin (19/5/2025).

Untuk itu, imbuhnya, mestinya otoritas di pelabuhan maupun pengelola terminal peti kemas lebih tegas bahwa ada batasan waktu maksimal berapa lama barang boleh mengendap di pelabuhan.

"Sebab kalau tidak tegas (aturannya) jangan salahkan pemilik barang kalau pelabuhan menjadi tempat simpan barang/kontainer," ucap Taufan.

Dia mengungkapkan, berbagai alasan barang/petikemas terbiarkan menumpuk lama (longstay) di pelabuhan, termasuk ada kemungkinan barang tersebut bermasalah sehingga tidak diurus pemiliknya.

Relokasi ke TPP

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Adil Karim mendesak kontainer longstay yang sudah tidak diurus pemilik barangnya harus direlokasi ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan bisa dikuasai oleh negara untuk kemudian dilelang atau dimusnahkan.

"Jadi bicara longstay itukan petikemas yang sudah cukup lama atau tahunan tapi memang harus dikeluarkan dari pelabuhan karena sangat mengganggu yard occupancy ratio atau YOR terminal dan produktivitas pelabuhan," ujar Adil Karim.

Menurut Adil, terhadap hal ini harus dibicarakan ke pihak Bea Cukai di pelabuhan setempat lantaran masih ada hak-hak negara yang belum selesai dan harus di selesaikan secara komprehensif.

Kemudian harus dilihat juga komoditinya apa. Apakah masih bagus barangnya atau sudah menjadi sampah dan penyelesaiannya bisa dengan lelang atau dimusnahkan dan duduk bareng untuk dicarikan solusinya baik lokasinya maupun biaya yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan perpindahannya ataupun pemusnahannya.

Kepentingan Pelayaran

Disisi lain, perusahaan pelayaran sangat berkepentingan agar kontainer yang merupakan bagian dari alat angkut transportasi laut bisa segera dimanfaatkan lagi oleh perusahaan pelayaran pemiliknya.

"Pelayaran mendesak soal kontainer longstay itu dicarikan solusinya lintas multi sektor untuk efisiensi pemindahan dan pelepasan kontainer bermasalah itu secara massal. Ini supaya kontainer-kontainer itu bisa digunakan lagi sebagai bagian alat angkut operasional pelayaran," ujar Sekretaris Umum DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, M.Erwin M Yahya Zubir, pada Senin (19/5/2025).

Dia menegaskan, fenomena kontainer longstay bukanlah hal baru jika tidak dijinakan maka akan menjadi bom waktu bagi logistik nasional.

Apalagi, imbuhnya, namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlahnya terus meningkat seiring dengan kompleksitas administrasi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta minimnya integrasi antarlembaga.

"Dalam banyak kasus, kontainer bermasalah atau tak bertuan itu tidak lagi sekadar barang tak terurus, melainkan menjadi beban struktural bagi kelancaran operasional pelabuhan," ucap Erwin.

INDONESIA NOMOR 122 DARI 122 NEGARA SOAL HAMBATAN EKSPOR DAN IMPOR

Indonesia menempati peringkat paling buncit dalam daftar negara dengan hambatan perdagangan internasional terbanyak di dunia. Posisi ini tercermin dalam laporan International Trade Barrier Index (TBI) 2025 yang dirilis lembaga riset kebijakan asal Amerika Serikat, Tholos Foundation. Indeks tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 122 dari total 122 negara yang dikaji. Skor rendah Indonesia disebabkan tingginya hambatan dalam aktivitas ekspor dan impor, mulai dari tarif perdagangan, pembatasan layanan, hingga regulasi teknis lainnya.

"Indonesia berada di urutan terakhir dalam pilar layanan dan menjadi studi kasus dalam laporan TBI 2025 karena pembatasan terhadap produk iPhone yang gagal masuk pasar akibat persyaratan konten lokal," tulis Tholos Foundation dalam laporannya, dikutip Minggu (11/5/2025).

Laporan TBI mengukur sejauh mana hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung diterapkan di berbagai negara. Hambatan langsung meliputi tarif, hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTB), serta pembatasan layanan.

Sementara hambatan tidak langsung mencakup logistik, perlindungan kekayaan intelektual, regulasi digital, hingga keanggotaan dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor total 5,84. Skor tersebut berasal dari aspek tarif sebesar 7,11 (peringkat 109), pembatasan layanan 8,15 (peringkat 122), NTB 2,1 (peringkat 79), dan fasilitasi perdagangan 6,0 (peringkat 87).

Sebaliknya, lima negara dengan hambatan perdagangan terendah di dunia alias paling terbuka adalah Hong Kong, Singapura, Israel, Kanada, dan Jepang. Di kawasan Asia, Indonesia bersanding dengan Vietnam (peringkat 117) dan Thailand (peringkat 118) sebagai negara yang masih menerapkan berbagai pembatasan dalam kegiatan ekspor-impor.

"Wilayah Asia Timur dan Pasifik memiliki rentang ekstrem. Di satu sisi, Hong Kong dan Singapura menempati posisi tertinggi. Di sisi lain, Indonesia dan Vietnam justru mencatat skor buruk dalam pilar tarif dan layanan," tulis Tholos Foundation.

Salah satu contoh kebijakan yang menjadi sorotan adalah aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang disebut membatasi akses produk asing ke pasar domestik.

Dalam laporan TBI, kebijakan ini disebut sebagai penghalang bagi masuknya iPhone 16 ke pasar Indonesia. Laporan ini menambah sorotan terhadap kebijakan perdagangan Indonesia yang sebelumnya juga menjadi perhatian Amerika Serikat dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2024. AS menilai berbagai regulasi lokal, termasuk kewajiban sertifikasi halal dan TKDN, sebagai hambatan non-tarif yang mengganggu kelancaran arus barang dan jasa.

RI EKSPOR MINYAK MENTAH KE 9 NEGARA INI, NILAINYA RP36,9 T

Indonesia ternyata melakukan kegiatan ekspor minyak mentah ke beberapa negara tujuan. Padahal negara ini juga masih melakukan kegiatan impor minyak mentah dari sejumlah negara lain lantaran produksi dalam negeri tak mencukupi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi rata-rata harian minyak RI pada tahun 2024 sebesar 580.224 barel per hari dan gas sebesar 5.481 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dengan begitu, realisasi produksi rata-rata minyak dan gas pada tahun 2024 mencapai 1,79 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Nah, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan sepanjang 2024. Bahkan nilai ekspor minyak mentah RI tercatat mencapai US$ 2.228.458.183 atau Rp 36,9 triliun.

Nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan 27,39% apabila dibandingkan data ekspor tahun 2023 yang tercatat hanya sebesar US$ 1.749.296.021 atau Rp 28,9 triliun.

Dari sisi volume, ekspor minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan dari 2.844.781.934 kg menjadi 3.620.104.103 di tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,25% secara tahunan.

Berikut daftar negara tujuan utama ekspor minyak mentah Indonesia sepanjang Januari-Desember 2024:

1. Jepang volume ekspor mencapai 144.182.505 kg dengan nilai US$ 94.003.303
2. Korea Selatan volume ekspor sebesar 188.941.931 kg dengan nilai US$ 111.841.796
3. China volume ekspor 139.966.702 dengan nilai US$ 76.285.388
4. Thailand volume ekspor 2.595.768.815 kg dengan nilai US$ 1.597.429.441
5. Singapura volume ekspor 334.080.868 kg dengan nilai US$ 219.682.507
6. Malaysia volume ekspor 40.702.908 kg dengan nilai US$ 20.048.418
7. Brunei Darussalam volume ekspor 26.950.000 kg dengan nilai US$ 15.226.635
8. Vietnam volume ekspor 8.529.084 kg dengan nilai US$ 6.052.610
9. Australia volume ekspor sebesar 140.981.290 kg dengan nilai US$ 87.888.085

BPJPH RI BAHAS PENGUATAN KERJA SAMA EKSPOR-IMPOR PRODUK HALAL DENGAN USDA DAN USMEF

Washington DC — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH RI) didampingi oleh atase pertanian, atase perdagangan, dan perwakilan KADIN di Washington DC mengadakan pertemuan strategis dengan Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) dan Asosiasi Ekspor Daging Amerika Serikat (USMEF) pada Jumat, 23 Mei 2025. Pertemuan membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat kerja sama ekspor-impor produk halal bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait pemenuhan standar dan sertifikasi halal untuk produk daging dan olahannya.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa langkah-langkah konkrit dan stategis penguatan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk membangun ekosistem halal global yang terpercaya, transparan, dan saling menguntungkan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia, khususnya dari sektor pangan, termasuk daging dan olahannya, telah memenuhi ketentuan halal yang sesuai dengan regulasi nasional dan standar halal global. Di sisi lain, pemerintah juga terbuka untuk mendukung pelaku usaha Amerika Serikat dalam memahami dan menyesuaikan standar halal yang berlaku domestik maupun global," kata Haikal Hasan di Washington DC, Jumat (23/5/2025).

Atase Pertanian dan Atase Perdagangan KBRI juga mengatakan bahwa fasilitasi perdagangan produk halal ini sangat penting dalam konteks penguatan hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Amerika Serikat, serta sebagai bentuk diplomasi halal yang produktif dan berkesinambungan.

"KBRI juga siap menjembatani komunikasi antara otoritas Indonesia dan pelaku usaha Amerika Serikat, demi memperlancar arus perdagangan produk halal yang berkualitas dan terpercaya." ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, USDA dan USMEF juga memberikan dukungan terhadap proses harmonisasi standar halal global dan menjalin kerja sama teknis dengan Lembaga Halal Luar Negeri yang ada di Amerika Serikat. Mereka juga menyambut baik peluang ekspor produk halal ke pasar Indonesia yang cukup besar dan semakin berkembang.

Melalui pertemuan ini, BPJPH melakukan diplomasi penting sebagai salah satu upaya mewujudkan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia, di mana Indonesia berperan sebagai produsen produk halal terbesar dunia dan sentral konektivitas halal lintas negara

BPOM DAN BARANTIN SATUKAN LANGKAH DALAM PENGAWASAN IKAN DAN DAGING IMPOR

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam pengawasan produk pangan yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki tugas utama menjamin keamanan pangan terutama hewan, ikan dan tumbuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Maka dari itu perlu bersinergi dengan BPOM dalam termasuk soal peraturan.

"Kami harus bersinergi dengan BPOM yang memiliki kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh," ujar Sahat M. Panggabean saat bertemu Kepala BPOM Taruna Ikrar pada Kamis, 22 Mei 2025 di kantor BPOM Jakarta.

Taruna mengungkapkan dalam kolaborasi lintas sektor dengan Barantin itu ada banyak hal yang disinkronkan. Mulai dari pengawasan produk hewani seperti daging, mengenai pangan hasil rekayasa genetika, hingga pertukaran data.

Langkah nyata sinergi kerja sama lintas sektor ini adalah ke depannya Barantin akan memastikan bahwa produk sudah melewati proses karantina dan pengolahan di negara asal.

Sementara itu, tugas BPOM memastikan produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Lewat kolaboarsi ini diharapkan bisa meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi pemeriksaan, dan mempercepat proses distribusi ke masyarakat.

Nantinya, kerja sama ini juga diarahkan untuk menjangkau proses produksi di negara asal sebelum produk dikirim ke Indonesia. Hal ini akan dilakukan melalui sistem layanan elektronik yang terintegrasi dengan perizinan BPOM, di mana seluruh dokumen persyaratan dapat diverifikasi secara digital. Proses ini diproyeksikan dapat diselesaikan dalam waktu 7 hingga 8 jam setelah dokumen dinyatakan lengkap, dengan seluruh biaya masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Lewat sinergi antara BPOM dan Barantin, diharapkan bakal ada harmonisasi standar dan regulasi keamanan pangan.

Lalu, bisa juga mendorong ekspor produk unggulan Indonesia seperti obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan berbasis hewan, ikan, dan tumbuhan, dengan jaminan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dalam kesempatan itu, BPOM dan Barantin menyepakati rencana penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antar kedua lembaga.

KADIN JATENG SAMBUT POSITIF WACANA DEREGULASI KEBIJAKAN EKSPOR-IMPOR

SEMARANG - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah, Harry Nuryanto Soediro, menyambut baik wacana deregulasi ekonomi yang digulirkan pemerintah. Wacana itu dinilai membawa peluang baru bagi sektor industri manufaktur yang selama ini bergantung pada pasokan bahan baku impor.

"Kalau aturannya akan dipangkas, akan lebih mudah mendatangkan bahan baku yang ada," ujarnya saat ditemui wartawan pada Rabu (21/5/2025).

Selama ini, Harry menilai pemerintah telah berupaya untuk menjaga daya saing industri di dalam negeri melalui kebijakan ekspor-impor yang ketat. Padahal, kebijakan tersebut pada praktiknya justru membuat pelaku usaha lain kehilangan ruang gerak.

"Ini memang terlalu banyak regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, karena untuk mencoba menjaga industri dalam negeri tetapi memang turunan dari bahan-bahan impor ini mestinyaharus lebih selektif, tidak semuanya dikenakan aturan," tutur Harry.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPE) Benny Soetrisno, pada pengujung 2024 lalu sempat mendorong pelonggaran atau deregulasi untuk kegiatan ekspor-impor.

Pendapat tersebut diucapkannya saat membuka Rapat Kerja dan Musyawarah Kerja GPEI di Kota Semarang.

UU Cipta Kerja dapat menjadi kerangka kebijakan yang mestinya dapat diimplementasikan di tingkat kementerian teknis, regulator, dan operator. Ini masih belum selesai, jadi regulasinya masih berbenturan," ucap Benny pada saat itu.

Wacana deregulasi ekonomi sendiri muncul ke publik di tengah eskalasi perang dagang yang dipicu kebijakan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyoroti aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga Bea Cukai yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyebut pemerintah bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi untuk memberikan rekomendasi paket kebijakan atas wacara tersebut.

"Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB (International Competitive Bidding," jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

CILACAP SIAP JADI HUB IMPOR TERNAK NASIONAL, FASILITAS KARANTINA DIPERLUAS HINGGA TAMPUNG 20 RIBU SAPI

CILACAP – Pelabuhan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap diproyeksikan menjadi salah satu pintu utama impor sapi nasional. Untuk mendukung hal ini, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah berencana memperluas kapasitas Instalasi Karantina Hewan (IKH) di pelabuhan tersebut.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Sokhib, mengungkapkan bahwa pengembangan IKH ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

"Pelabuhan Tanjung Intan memiliki posisi strategis, sehingga Balai Karantina Nasional merencanakan pengembangan serta perluasan kapasitas IKH," ujarnya.

Saat ini, fasilitas karantina hewan di pelabuhan tersebut hanya mampu menampung sekitar 2.000 ekor sapi. Namun, setelah peningkatan kapasitas, targetnya bisa mencapai 20.000 ekor.

Sokhib menekankan bahwa Balai Karantina Jawa Tengah siap mendukung program pemerintah, termasuk memfasilitasi impor hingga dua juta ekor sapi.

Keberadaan IKH sangat krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan kesehatan hewan impor. Dengan fasilitas yang memadai, risiko penyebaran penyakit hewan dapat diminimalisir.

Lokasi IKH di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Intan dinilai ideal karena mempermudah pengawasan. Selain itu, pengembangan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, fasilitas karantina modern akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.

"Dengan adanya fasilitas karantina hewan yang lebih modern dan berkapasitas besar, kita bisa memastikan lalu lintas hewan ternak tetap aman dan sesuai standar kesehatan. Ini akan memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Cilacap, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan masyarakat," katanya.

Cilacap dinilai memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan, khususnya untuk sapi dan kambing. Selain populasi ternak yang tinggi, letaknya yang strategis dekat Australia—salah satu eksportir ternak terbesar—menjadi nilai tambah.

"Kita punya pelabuhan dan kita dekat dengan Australia yang notabene menjadi negara penghasil ternak terbesar. Itu menjadi nilai tambah dalam pengembangan ternak di Cilacap," jelas Syamsul.

Untuk mewujudkan visi ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan investor sangat dibutuhkan.

"Pemerintah daerah, BUMD, hingga koperasi desa diharapkan dapat bersinergi dengan investor guna membangun ekosistem peternakan yang berkelanjutan," tegasnya.

Selain itu, kerjasama dengan investor akan didorong melalui BUMD dan BUMDes. Pemerintah juga menggalakkan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu wadah kolaborasi.

"Sekarang pemerintah sedang menggalakkan koperasi merah putih, nanti kerjasamanya bisa lewat situ," pungkas Syamsul.

PELABUHAN EKSPOR-IMPOR UTAMA DIPINDAHKAN KE INDONESIA TIMUR, KETUA INSA: POTENSI LUAR BIASA

Sebuah wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional, yakni pemindahan gateway (pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur, kini menjadi topik hangat yang siap didiskusikan secara konstruktif.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyambut baik diskusi mengenai wacana ini, melihatnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Wacana pemindahan gateway ini membuka cakrawala baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur," ujar Carmelita.

Beliau memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbukanya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. Hal ini, menurutnya, sangat sejalan dengan semangat kebijakan cabotage dan upaya bersama mengoptimalkan utilisasi armada kapal nasional.

Sembari mengakui adanya tantangan yang perlu diantisipasi, seperti kesiapan infrastruktur dan potensi penyesuaian biaya logistik, Carmelita menekankan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dan perencanaan yang matang.

"Tentu ada aspek-aspek yang perlu kita siapkan bersama, mulai dari infrastruktur pelabuhan hingga kesiapan SDM. Namun, dengan semangat gotong royong dan perencanaan yang baik, kita optimis tantangan ini bisa menjadi peluang untuk perbaikan," paparnya.

Ketua INSA menyoroti pentingnya pendekatan yang bijaksana, termasuk dalam mengelola dampak terhadap industri manufaktur dan memastikan kelancaran arus barang. Beliau menyarankan perlunya kajian mendalam dan dialog terbuka untuk merumuskan solusi terbaik, seperti kemungkinan penerapan kebijakan berbeda antara entry point bahan baku dan barang jadi, serta penguatan sistem pengawasan untuk menjaga integritas jalur perdagangan.

Lebih lanjut, Carmelita menegaskan bahwa wacana ini masih berada dalam tahap awal diskusi dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Dia menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi gagasan ini di masa depan akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kerangka regulasi yang suportif, serta strategi diferensiasi komoditas yang tepat, yang semuanya memerlukan koordinasi erat antar pemangku kepentingan.

Mengingat signifikansi dan kompleksitas wacana ini, Carmelita mengonfirmasi bahwa forum Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 akan menjadi platform ideal untuk membahas gagasan pemindahan gateway ekspor-impor ke Indonesia Timur secara komprehensif dan konstruktif.

"Indonesia Maritime Week 2025 adalah momentum yang tepat untuk kita duduk bersama, mengupas tuntas wacana gateway ini dari berbagai perspektif. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi, untuk bersama-sama mengeksplorasi potensi dan mencari solusi inovatif demi kemajuan maritim nasional," pungkasnya.

Penyelenggaraan Indonesia Maritime Week 2025 ini juga menjadi bukti nyata kepedulian dan pandangan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor maritim sebagai pilar penting pembangunan nasional, serta komitmen untuk terus mendorong dialog konstruktif demi kemajuan bangsa.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

Menimbang :

a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
c. bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk expansible polystyrene sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene (EPS), telah berakhir masa berlakunya dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk expansible polystyrene;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Pasal 2

Terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (expansible polystyrene) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:

a. bea masuk umum (most favoured nation); atau
b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan

Pasal 5

(1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap importasi produk expansible polystyrene dari semua negara.
(2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk expansible polystyrene yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk expansible polystyrene yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
(3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
    a. kriteria asal barang (origin criteria);
    b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
    c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (certificate of origin) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
(5) Dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi, penelitian surat keterangan asal (certificate of origin) nonpreferensi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal importasi produk expansible polystyrene berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
(2) Dalam hal surat keterangan asal (certificate of origin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sedang dilakukan permintaan

retroactive check, atas importasi produk expansible polystyrene yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 8

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap barang impor produk expansible polystyrene yang:
   a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
   b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

(2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE Mei 2025

1. **CENTRAL JAVA INVESMENT BUSINESS FORUM DAN UMKM GAYENG 2025**
   BPD GINSI JAWA TENGAH menghadiri acara CJIBF 2025 pada hari Senin, 5 Mei 2025 di Hotel Tentrem.

2. **HUT GINSI KE – 69 TAHUN**
   BPD GINSI Jawa Tengah merayakan HUT GINSI ke 69 Tahun pada tanggal 21 Mei.